

**Jurnal:**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *BALI NDESO MBANGUN DESO***

**DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**(Studi Kasus Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada  
Pemerintah Desa Tahun 2009 -2012 dalam Bidang Pertanian Di Desa Sawangan, Desa  
Babalan Kidul dan Desa Bebel)**

Budi Nur Hadi Wibowo

14010110120033

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***Abstrac***

This research was undertaken with the policy background *Bali Ndeso Mbangun Deso* the government of the province of central java. in Efforts to Realize economic development to the optimal -based society in the villages, then plays in Achieving financial assistance to the government developing village years 2009-2012 to 1776 village .The number of funds provided by provincial budget amounting to Rp 100,000,000,- (one hundred million rupiah) for the village call now. Financial aid funds this is a stimulus, just where is dedicated to increasing economic-based society (agriculture, animal husbandry, fisheries, Small and medium enterprises), as well as its use through a system of revolving.

This study focused on the implementation of the in the fields of agriculture. Researchers used a method of the qualitative study that refers to the type of descriptive research on the subject of study is analytical. The parties that is concerned and is Involved in the implementation of a policy of financial assistance to the village administration of them developing years 2009-2012 provincial central java Bapermades BPMPKB pekalongan district, the village administration Sawangan, village babalan kidul, bebel village and the community. Data collection techniques through observation, interviews, documentation, the literature study and then Analyzed through a data reduction technique, presentation of the data and verification / draw any Conclusions.

The result of this research Showed that the implementation of financial assistance to the village administration developing years 2009-2012 in the fields of agriculture has not produces Increased agricultural productivity Effectively, it is the absence of technical guidance about the business development of agriculture. Besides, to distribute the loans prone to congestion if the result of the harvest is not optimal, Thus reducing the Attainment of participatory by the society.

To fix this policy, of course, the need for improvement both administratively and technically. A grant plus, intensivity coaching of Bapermades and related local government offices agriculture to farmers, maximizing control system and irrigation infrastructure improvements.

**Keywords :** Effectiveness, Policy, Rural Assistance, Agriculture

## **Pendahuluan**

Kebijakan *Bali Deso Mbangun Deso* merupakan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Jawa Tengah, bahwa tujuan pembangunan jangka panjang provinsi Jawa Tengah adalah untuk mewujudkan Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera dan lestari. Sebagai penjabaran dari RPJPD tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 – 2013, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan provinsi Jawa Tengah dengan visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera. Implementasi Visi – Misi pembangunan dari kebijakan *Bali Deso Mbangun Deso* dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu, (i) Tahap Konsolidasi dan Persiapan (2008 -2009); (ii) Tahap Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber Daya secara lestari dan Pelayanan Prima dalam *E-Government* (2010-2011); dan (iii) Tahap Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan Berdaya saing tinggi (2012-2013).

Kebijakan *Bali Deso Mbangun Deso*, salah satu implementasinya adalah pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa kategori desa berkembang. Desa berkembang yang dimaksud adalah desa dengan tingkat perkembangan swadaya, yakni desa yang memiliki potensi tertentu namun belum dikembangkan secara baik. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut kepada 1776 desa dan dialokasikan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada desa. Sasaran kebijakan pemberian bantuan stimulus ini yaitu, masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya dan sanggup mengembalikan modal stimulus secara bergulir.

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012 dalam salah satu sasarannya adalah untuk pembangunan dibidang pertanian, namun kondisi selama pelaksanaan kebijakan masih terbilang masih belum mampu menjawab masalah pertanian di Jawa Tengah . hal ini diketahui melalui angka Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Tengah masih terbilang rendah dan realitas jumlah petani di Jawa Tengah yang semakin menurun.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung padi nasional. Sehingga ketahanan pangan nasional tentunya ditopang oleh tingkat produktivitas pertanian di Jawa Tengah. Namun kondisi Jawa Tengah sebagai lumbung padi nasional tentunya juga ditentukan oleh hasil produktivitas pertanian di 35 kabupaten dan kotanya. Salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan yang luas wilayahnya 83.613,068 hektar, 25.472,069 hektar atau 30.46% merupakan tanah sawah dan 58.140,999 ha atau 69,54% merupakan tanah kering. Dengan fakta tersebut tentunya kondisi baik-buruknya hasil pertanian di Kabupaten Pekalongan akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas di Jawa Tengah.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012, yang mana salah satu bidang yang digarap adalah bidang pertanian. Kabupaten Pekalongan merupakan kabupaten yang beberapa desanya menerima bantuan tersebut sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sebagai pengembangan ekonomi kerakyatan di desa. Bantuan tersebut sistem penggunaannya tidak hanya dialokasikan dalam bidang pertanian, akan tetapi dialokasikan juga untuk pengembangan bidang ekonomi kerakyatan lainnya. Hal ini menjadikan dana yang dialokasikan untuk pengembangan bidang pertanian tidak besar. Kondisi tersebut tentunya akan mengurangi kemampuan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didalam kebijakan *Bali Deso Mbangun Deso* nya yang salah satu implementasinya melalui pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012 seharusnya dapat menjadi sebuah jawaban positif dan solusi didalam menindak lanjuti peluang yang ada serta masalah – masalah petani dan pertanian di Jawa Tengah, namun setelah menelaah dari apa yang telah diuraikan sepertinya implementasi kebijakan tersebut belum mampu mewujudkan hasil yang progresif yakni meningkatkan potensi dan kesejahteraan petani yang ada di desa di Jawa Tengah, sebagai kasus salah satunya di Kabupaten Pekalongan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian dilakukan dengan metode penelitian di lapangan dengan observasi partisipatif dan wawancara serta dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang memadai. Penelitian dilakukan dalam wilayah penelitian yang sempit dan sampel yang digunakan tidak begitu banyak. Sehingga penelitian dapat fokus pada kondisi dan latar belakang penelitian. Selain melalui observasi, penelitian dilakukan dengan menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tahun 2009 – 2012 dalam pelaksanaannya di desa – desa penerima bantuan, untuk kemudian di ambil kesimpulan secara deskriptif.

Sesuai dengan studi kasus penelitian, maka penelitian dilakukan di Kabupaten Pekalongan. Lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dengan tidak mengesampingkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kabupaten Pekalongan dipilih karena bentang wilayahnya memiliki kriteria potensi ekonomi kerakyatan yang berbeda sebagaimana gambaran umum provinsi Jawa Tengah. Kriteria-kriteria potensi ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari aspek geografis yang terbentang dari pesisir sampai dataran tinggi di Kabupaten Pekalongan. Dasar tersebut sesuai dengan fokus bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2012 yakni dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan UMKM. Sesuai dengan alasan dan pertimbangan tersebut, penulis memilih Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran, Desa Babalan Kidul, Kecamatan Bojong dan Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto. Dalam penelitian ini, penulis juga mencari informasi di instansi pemerintahan, yakni Bapermades Provinsi Jawa Tengah (sebagai fasilitator bantuan dan bimbingan teknis), dan BPMPKB Kabupaten Pekalongan (sebagai pengawas dan pembimbing dilapangan).

## **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian melihat dari 3 hal yaitu :

### **1. Pencapaian Produktivitas Pertanian**

Hasil produksi menjadi salah satu tujuan atas pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012. Hasil produksi menjadi cerminan keberhasilan dari kebijakan, apakah ketercapaian hasil sesuai dengan anggaran yang digulirkan serta kesesuaian pelaksanaan bantuan dilapangan berjalan sebagaimana mestinya.

Pada kasus kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun 2009-2012, capaian hasil produksi pertanian di kabupaten Pekalongan selama pengguliran bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun 2009-2012 bisa dikatakan tidak ada sama sekali pengaruh dengan ada ataupun tidak adanya bantuan tersebut. Dr. Sunyoto Usman (2006 : 43) mengatakan bahwa bantuan-bantuan yang bersifat modal pengelolaan pertanian hanya berkembang pada sawah yang sumber irigasinya baik, sedangkan

kebanyakan adalah sawah-sawah tadah hujan, hal tersebut menjadikan bantuan sulit berkembang. Hal tersebut sesuai dengan realitas apa yang terjadi pada bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang digulirkan di bidang pertanian. Bantuan tersebut tidak visibel dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas, hal ini karena bantuan yang diterima masing-masing petani hanya berkisar Rp. 650.000 sampai Rp.1.500.000. Bantuan yang terbatas tersebut, habis digunakan untuk satu kali biaya operasional produksi saja, sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis yaitu untuk membeli benih, membeli pupuk, membeli obat-obatan maupun sarana produksi pertanian (saprotan), padahal faktor-faktor keberhasilan dalam bidang pertanian sangat kompleks. Faktor ketersediaan air menjadi hambatan bagi sawah-sawah tadah hujan, sebagaimana sawah-sawah di daerah kabupaten pekalongan kebanyakan adalah sawah-sawah tadah hujan, hal ini menjadi hambatan ketika musim kemarau panjang melanda. Ketersediaan air pertanian susah untuk didapatkan, walaupun ada, air yang di sediakan adalah hasil pompa, tentunya petani harus membayar untuk menggunakannya. Realitas ini tidak difikirkan oleh pemerintah, padahal masalah air merupakan faktor vital dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian yang menjadi tujuan kebijakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bisa peneliti katakan bahwa bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun 2009-2012 di Kabupaten Pekalongan yang digulirkan di bidang Pertanian tidak berdampak terhadap hasil produktivitas pertanian, dengan kata lain pada usaha pencapaian produktivitas pertanian belum efektif.

## **2. Pencapaian Partisipasi Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat desa secara langsung dalam pembangunan merupakan salah satu tujuan dari kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012. Masyarakat desa diharapkan mampu mengembangkan dana bantuan tersebut sesuai dengan bidang yang dikerjakannya. Melalui lima bidang ekonomi kerakyatan yaitu, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan usaha mikro kecil dan menengah yang dibantukan melalui bantuan keuangan dapat mendorong kreatifitas masyarakat, dana dikembangkan bergulir secara bergantian, sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan oleh banyak masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan perkembangan pengguliran bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012 di setiap bidangnya bisa digulirkan sebagaimana mekanisme yang diatur didalam petunjuk teknis. Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat ikut menggunakan dana bantuan tersebut secara bergantian, artinya partisipasi masyarakat setiap periodenya meningkat atau bertambah meskipun tidak banyak, hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang periode sebelumnya sudah pinjam, ditahun berikutnya ikut meminjam kembali. Namun kondisi ini tidak lancar sebagaimana mestinya, ada hambatan yang diakibatkan oleh dampak dari rendahnya hasil produktivitas pertanian, sehingga menyebabkan petani merugi dan tidak bisa mengembalikan pinjaman untuk digulirkan kembali ke masyarakat lainnya.

### **3. Keberlanjutan Kebijakan**

Pada kasus pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012, keberlanjutan kebijakan bergantung pada 2 usaha yakni pencapaian produktivitas dan partisipasi masyarakat. Produktivitas merupakan pencapaian hasil atas penggunaan bantuan modal tersebut, dan partisipatif masyarakat, yakni saling bergantian pinjam untuk bergantian menggunakan manfaat bantuan keuangan tersebut, dengan syarat masyarakat yang pinjam setelah memanfaatkannya diharapkan bisa mengembalikannya. Jika 2 usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka keberlanjutan kebijakan juga bisa bermasalah.

Melihat hasil atas capaian produktivitas pertanian serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012 di kabupaten Pekalongan, sampai saat ini masih berjalan. Meskipun dampak atau pengaruhnya dalam peningkatan produktivitas pertanian terbilang sedikit bahkan tidak ada sama sekali, namun pengguliran dananya masih bisa berjalan, terkecuali pada desa yang pengguliran dananya terhenti sebab gagal panen sehingga tidak sanggup untuk mengembalikan pinjamannya serta tidak adanya kesadaran masyarakatnya yang memahami bahwa dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012 merupakan dana bersama yang harus digulirkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya, sebagaimana yang terjadi didesa Bebel, kecamatan Wonokerto.

## **Kesimpulan**

Pencapaian produktivitas serta partisipasi masyarakat menjadi tujuan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012. Dalam hal ini memfokuskan penelitian pada pelaksanaan bantuan keuangan tersebut yang dialokasikan di bidang pertanian, studi kasus pelaksanaan di Kabupaten Pekalongan dengan mengambil sampel di Desa Sawangan, Desa Babalan Kidul dan Desa Bebel. Dengan melihat apa yang ada di lapangan serta menganalisis dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, peneliti menemukan dan kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berkembang tahun 2009-2012 yang dikembangkan di bidang pertanian studi kasus pelaksanaan di Kabupaten Pekalongan, dapat dikatakan belum berhasil dalam efektivitas kebijakan



## Daftar Pustaka

### Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Sajogyo, Pudjiwati & Sajogyo. 1984. *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*. Jakarta: Buku Obor
- SF Masbun dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta : Cv Rajawali
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suryadi, A. 1989. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Mandar Maju
- Usman, Dr. Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Widjaya, Haw. 2003. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press

### Internet :

- Misi Program Bali Ndeso Mbangun Deso dalam [banking.blog.gunadarma.ac.id](http://banking.blog.gunadarma.ac.id)
- Pengertian mengenai Nilai Tukar Petani dalam [gis.deptan.go.id](http://gis.deptan.go.id)
- Jawa Tengah Surplus Beras tahun 2009 dan 2010 dalam [www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)

**Regulasi:**

Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 460/60/2009 tentang Pemberian Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009

Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 411.3/089/2010 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah